

REFORMASI SISTEM PELAYANAN PUBLIK DI ERA DIGITAL DALAM MENJEMBATANI DAS SOLLEN DAN DAS SEIN PADA TATA KELOLA PEMERINTAHAN KOTA BUKITTINGGI

Alimah Tusak Diyah, Syamsir, Adria Fahyumi Alfanzha, Anisa Delia Safitri, Annisa Fadillah, Gian Yoga Nasirwan Batubara

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

E-mail: almhtskdyh@gmail.com

Abstract

This study examines the reform of digital public service delivery in Bukittinggi City by analyzing the gap between Das Sollen—the ideal standards of governance—and Das Sein—the actual conditions observed in implementation. The city's digital transformation efforts demonstrate a strong commitment to enhancing efficiency, transparency, and service quality. However, findings reveal persisting challenges, including limited civil servant digital competence, fragmented system integration, and varied levels of public digital literacy. Using a descriptive qualitative approach, this research identifies how digital policies are translated into practice and evaluates the extent to which current reforms bridge the ideal and the real. The study highlights the need for capacity-building, stronger digital infrastructure, and community empowerment to achieve more inclusive and adaptive public services.

Keywords: *public service reform, digital governance, Das Sollen, Das Sein, Bukittinggi City.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis reformasi pelayanan publik digital di Kota Bukittinggi dengan fokus pada kesenjangan antara Das Sollen—standar ideal pelayanan dan Das Sein realitas implementasi di lapangan. Transformasi digital yang diupayakan pemerintah daerah mencerminkan komitmen untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi, namun hasil temuan menunjukkan adanya hambatan pada kesiapan SDM, integrasi sistem, serta literasi digital masyarakat. Penelitian ini memotret bagaimana kebijakan digital diterjemahkan dalam praktik dan sejauh mana reformasi mampu menjembatani idealitas dan realitas pelayanan publik. Melalui analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur, penguatan infrastruktur digital, dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih adaptif dan inklusif.

Kata Kunci: *reformasi pelayanan publik, digital governance, Das Sollen, Das Sein, Kota Bukittinggi.*

PENDAHULUAN

Reformasi sistem pelayanan publik merupakan kebutuhan mendesak dalam tata kelola pemerintahan modern, terutama ketika tantangan digitalisasi berkembang lebih cepat daripada kemampuan birokrasi untuk beradaptasi (Muchlashin, 2025).

Banyak pemerintah daerah di Indonesia menghadapi tekanan untuk menyediakan pelayanan publik yang semakin efisien, transparan, dan responsif, sejalan dengan tuntutan masyarakat yang kian terdigitalisasi (Muchlashin, 2025). Kota Bukittinggi merupakan salah satu wilayah yang sedang mendorong transformasi

digital, namun sama seperti banyak pemerintah daerah lain, upaya tersebut menghadapi berbagai hambatan struktural, kultural, dan teknis. Dalam konteks ini, penting untuk menelaah bagaimana reformasi pelayanan publik digital dapat menjembatani kesenjangan antara *das sollen* yakni standar, nilai, dan harapan ideal dengan *das sein*, yaitu kondisi riil birokrasi dan pelayanan yang berlangsung saat ini (Reformasi & Dewi, 2024).

Secara umum, masalah utama dalam pelayanan publik di era digital adalah ketidaksiapan birokrasi untuk bertransformasi secara menyeluruh (Kelibay et al., 2022). Transformasi digital bukan hanya persoalan mengubah layanan dari manual ke elektronik, tetapi mengharuskan perubahan paradigma kerja, struktur organisasi, kapasitas sumber daya manusia, hingga pola relasi pemerintah–masyarakat. Ketika birokrasi tidak mampu berubah secara adaptif, digitalisasi justru menghasilkan layanan yang tidak efektif, kurang inklusif, atau bahkan menciptakan ketimpangan baru antara masyarakat yang melek teknologi dan yang tidak.

Masalah umum tersebut kemudian memunculkan masalah khusus yang lebih mengerucut pada tata kelola pemerintahan tingkat daerah. Pertama, masih banyak layanan publik yang belum terstandarisasi dengan baik sehingga integrasi sistem digital sulit terwujud (Eneng Indriyanih, 2022). Kedua, kompetensi digital aparatur belum merata sehingga pelaksanaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sering kali berjalan setengah hati. Ketiga, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) masih lemah, menyebabkan

fragmentasi data dan layanan (Almasari Aksenta et al., 2023). Keempat, tingkat literasi digital masyarakat masih bervariasi, sehingga e-service tidak dimanfaatkan secara optimal. Kelima, terdapat hambatan regulatif dan budaya birokrasi, seperti kecenderungan mempertahankan prosedur manual atau resistensi terhadap inovasi.

Situasi ini menimbulkan *gap* yang sangat jelas antara kondisi ideal yang diharapkan dan kondisi faktual yang terjadi. Dalam tata kelola pemerintahan, konsep *das sollen* merujuk pada apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah sesuai standar normatif, hukum, prinsip good governance, serta visi reformasi birokrasi. *Das sollen* mencakup pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, berbasis data, dan memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Sementara itu, *das sein* menggambarkan realitas empiris berupa keterlambatan layanan, prosedur berbelit, sistem digital yang tidak terintegrasi, rendahnya kompetensi aparatur, serta praktik-praktik birokrasi yang masih konvensional. Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* inilah yang menjadi inti permasalahan dalam reformasi pelayanan publik digital (Reformasi & Dewi, 2024).

Dalam konteks Kota Bukittinggi, kesenjangan ini menjadi semakin kompleks karena kota ini memiliki karakter sebagai pusat perdagangan, pariwisata, serta kegiatan sosial ekonomi yang dinamis. Semakin tinggi aktivitas masyarakat, semakin tinggi pula ekspektasi terhadap kualitas pelayanan publik. Namun, kapasitas birokrasi untuk mengimbangi perubahan sosial dan teknologi sering kali tertinggal. Ketidakselarasan

antara tuntutan publik yang semakin digital dengan kemampuan birokrasi yang masih konvensional memperlebar jurang antara *das sollen* dan *das sein*. Jika kesenjangan ini tidak segera dijembatani, maka pelayanan publik akan sulit mencapai tujuan utamanya: memberi kemudahan, kepastian, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana reformasi pelayanan publik berbasis digital dapat dirancang dan dijalankan secara efektif pada tingkat pemerintah daerah. Penelitian ini penting karena transformasi digital bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk memperbaiki kualitas tata kelola. Dengan kata lain, digitalisasi harus mampu mengatasi hambatan birokrasi, bukan sekadar memindahkan proses manual ke platform elektronik tanpa perubahan berarti. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor penghambat, upaya reformasi, dan potensi inovasi digital di Kota Bukittinggi dapat memberikan kontribusi bagi literatur reformasi birokrasi, praktik pelayanan publik, serta pengembangan kebijakan daerah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi akademisi, tetapi juga memiliki manfaat praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan berbasis bukti, meningkatkan efektivitas layanan, serta memperkuat kepercayaan publik. Reformasi sistem pelayanan publik di era digital merupakan kunci untuk mewujudkan tata kelola yang adaptif, inklusif, dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern, sekaligus memastikan bahwa idealitas *das sollen* dapat dicapai secara nyata

dalam *das sein* pemerintahan Kota Bukittinggi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam kesenjangan antara *Das Sollen* (ketentuan normatif yang seharusnya diterapkan dalam tata kelola pemerintahan) dan *Das Sein* (realitas implementasi di lapangan) pada reformasi pelayanan publik berbasis digital di Kota Bukittinggi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap konteks sosial-administratif, dinamika kebijakan, serta pengalaman empiris aktor birokrasi dan masyarakat sebagai pengguna layanan (Nurlaila et al., 2024).

Jenis penelitian bersifat studi kasus yang berfokus pada tata kelola pelayanan publik Kota Bukittinggi sebagai unit analisis (Darmawan, 2019). Pemilihan Kota Bukittinggi didasarkan pada karakteristiknya sebagai daerah yang sedang memperluas transformasi digital melalui e-government, namun masih menghadapi berbagai tantangan implementatif sehingga relevan untuk dianalisis melalui kerangka *Das Sollen–Das Sein*.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur selama KKL bersama Drs. Melfi Abra, M.Si., Staf Ahli Wali Kota Bukittinggi terkait pengguna layanan seperti perizinan, administrasi kependudukan, serta layanan informasi publik. Data sekunder meliputi dokumen kebijakan, peraturan perundungan, rencana

strategis daerah, laporan kinerja, publikasi pemerintah, serta literatur ilmiah terkait tata kelola digital, reformasi birokrasi, dan konsep Das Sollen-Das Sein. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumentasi, dan observasi terbatas terhadap aksesibilitas serta proses layanan digital di lapangan. Ketiga teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa data mencerminkan kondisi normatif, kondisi aktual, serta hambatan implementatif yang relevan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan faktor penyebab perbedaan antara Das Sollen dan Das Sein. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menyusun gambaran reformasi pelayanan digital serta merumuskan rekomendasi perbaikan tata kelola di Kota Bukittinggi.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika pelayanan publik di Kota Bukittinggi berada dalam proses transisi menuju tata kelola pemerintahan digital. Reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah daerah menunjukkan adanya komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan, transparansi, dan efektivitas administrasi, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kesenjangan struktural maupun teknis (Wulandari, 2023). Temuan utama dapat dijelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Drs. Melfi Abra, M.Si., Staf Ahli Wali Kota Bukittinggi,

reformasi pelayanan publik digital di Kota Bukittinggi menunjukkan arah transformasi yang kuat menuju tata kelola modern. Pemerintah daerah telah menempatkan digitalisasi sebagai prioritas strategis, dengan upaya pengembangan platform layanan, penguatan unit pelayanan, dan penyederhanaan prosedur untuk mempercepat akses masyarakat. Komitmen ini mencerminkan kerangka *Das Sollen* yang menuntut pelayanan publik lebih adaptif, responsif, dan terukur. Namun, realitas implementasi menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara idealitas dan praktik, karena sebagian prosedur masih dilakukan secara manual atau semi-digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa *Das Sein* belum sepenuhnya mencerminkan standar pelayanan digital yang diharapkan. Hambatan tersebut sebagian besar bersumber dari keterbatasan infrastruktur, perbedaan kompetensi teknis antaraparatur, serta kesiapan masyarakat yang belum merata dalam memanfaatkan layanan digital.

Lebih jauh, disampaikan bahwa kualitas sumber daya manusia birokrasi menjadi tantangan sentral. Banyak aparatur belum sepenuhnya menguasai sistem layanan digital atau masih memerlukan adaptasi yang cukup panjang terhadap perubahan teknologi. Selain itu, teknologi yang digunakan juga belum sepenuhnya terintegrasi karena interoperabilitas yang rendah dan keterhubungan antar-perangkat daerah yang belum optimal. Tantangan serupa juga tampak pada sisi masyarakat, di mana tingkat literasi digital yang berbeda-beda membuat sebagian warga masih lebih nyaman dengan pelayanan manual. Kendala jaringan dan keterbatasan perangkat semakin memperlebar kesenjangan akses

pelayanan digital. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya membutuhkan reformasi internal birokrasi, tetapi juga strategi edukasi dan pemberdayaan publik agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah mulai mengembangkan pendekatan kolaboratif dengan perguruan tinggi dan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur, pengembangan inovasi pelayanan, serta evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas layanan digital. Langkah tersebut selaras dengan prinsip *good governance* dan menjadi strategi penting dalam memperkecil jurang antara *Das Sollen* dan *Das Sein*. Secara keseluruhan, apa yang disampaikan Drs. Melfi Abra menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi berada pada fase transisi menuju tata kelola digital yang lebih matang. Reformasi telah berjalan, tetapi memerlukan penguatan sistem, pengembangan kompetensi aparatur, dan partisipasi masyarakat agar digitalisasi benar-benar mampu mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Transformasi pelayanan publik digital di Kota Bukittinggi merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi daerah untuk mewujudkan tata kelola yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat modern. Dalam kerangka *Das Sollen*, pemerintah telah menetapkan standar normatif pelayanan publik, yaitu pelayanan yang cepat, efisien, transparan, dan

inklusif. Standar ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan arah reformasi yang menempatkan digitalisasi sebagai fondasi sistem pelayanan publik masa depan (Dolosi et al., 2018). Kehadiran berbagai kebijakan digitalisasi, pengembangan aplikasi layanan, serta penataan prosedur pelayanan menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bukittinggi memiliki komitmen normatif yang kuat untuk bergerak menuju tata kelola berbasis teknologi.

Namun, ketika gagasan normatif tersebut dihadapkan pada realitas implementasi atau *Das Sein*, muncul kesenjangan yang cukup signifikan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagian mekanisme pelayanan masih berlangsung secara manual atau semi-digital, terutama pada layanan yang membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah atau layanan yang memerlukan interaksi langsung dengan masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa reformasi digital belum sepenuhnya mapan, dan masih berada dalam fase transisi. Kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* inilah yang menjadi fokus utama dalam pembahasan reformasi pelayanan publik di Kota Bukittinggi.

Salah satu sumber utama kesenjangan tersebut terletak pada aspek kapasitas sumber daya manusia (SDM). Aparatur pemerintah merupakan aktor utama yang berperan dalam operasionalisasi sistem layanan digital. Meskipun terdapat kemauan dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas aparatur, kenyataannya tidak semua pegawai memiliki kemampuan teknis yang memadai. Sebagian aparatur masih membutuhkan pelatihan intensif untuk memahami sistem, mengoperasikan aplikasi layanan, dan

menyelesaikan masalah teknis yang muncul dalam proses layanan digital. Ketika kompetensi aparatur tidak sejalan dengan tuntutan sistem, maka proses pelayanan publik digital tidak dapat berjalan optimal. Inilah salah satu bentuk *Das Sein* yang menjauh dari *Das Sollen*, di mana idealitas layanan cepat dan otomatis harus berhadapan dengan tingkat kesiapan aparatur yang beragam.

Selain faktor SDM, aspek kesiapan teknologi menjadi tantangan lainnya. Integrasi sistem antarperangkat daerah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan efektivitas pelayanan digital. Namun, penelitian menunjukkan bahwa belum semua perangkat daerah di Kota Bukittinggi terhubung dalam satu ekosistem digital yang terpadu. Akibatnya, layanan yang idealnya dapat dilakukan secara otomatis dan lintas sektor masih memerlukan perpindahan berkas manual ataupun koordinasi tambahan. Keterbatasan interoperabilitas sistem membuat beberapa proses layanan masih lambat, bahkan memerlukan verifikasi manual. Hal ini berimplikasi pada konsistensi pelayanan: sementara beberapa layanan dapat diselesaikan dengan cepat melalui aplikasi digital, layanan lain masih tergantung pada mekanisme konvensional.

Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh infrastruktur teknologi yang belum merata. Stabilitas jaringan internet di beberapa lokasi pelayanan, keterbatasan perangkat pendukung, hingga sistem digital yang tidak selalu bekerja optimal menjadi hambatan teknis yang memperlambat implementasi. Tantangan ini mempertegas bahwa transformasi digital bukan hanya soal menyediakan aplikasi, tetapi membangun ekosistem

teknologi yang kuat, terstandar, dan terintegrasi.

Dari sisi masyarakat, transformasi pelayanan publik digital juga menghadapi tantangan dalam hal literasi digital dan akses teknologi. Tingkat literasi digital masyarakat Kota Bukittinggi tidak seragam; sebagian warga telah terbiasa menggunakan aplikasi layanan berbasis internet, tetapi sebagian lainnya masih lebih percaya pada model pelayanan manual. Beberapa faktor penyebabnya mencakup ketidakpahaman cara menggunakan aplikasi, keterbatasan perangkat smartphone, hingga jaringan internet yang kurang stabil (Kiswanton et al., 2024). Dalam konteks *Das Sollen*, masyarakat diposisikan sebagai aktor partisipatif yang mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Namun pada *Das Sein*, digitalisasi belum sepenuhnya diterima atau digunakan oleh seluruh warga. Dampaknya, masyarakat yang tidak siap cenderung tetap mendatangi kantor pelayanan secara langsung, sehingga antrean fisik dan proses panjang masih terjadi pada beberapa jenis layanan.

Menariknya, pemerintah Kota Bukittinggi telah mencoba mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui pendekatan kolaboratif. Pemerintah daerah mulai menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan mitra strategis lainnya untuk meningkatkan kualitas implementasi digitalisasi. Perguruan tinggi, misalnya, berperan sebagai penyedia riset, evaluasi, dan inovasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan sistem layanan publik digital. Kolaborasi ini sejalan dengan prinsip *co-creation*, yang menekankan bahwa reformasi pelayanan tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah sendiri

tanpa melibatkan aktor eksternal. Pendekatan kolaboratif memungkinkan penyusunan model pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berbasis pada bukti empiris.

Dalam upaya memperkecil kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*, pemerintah daerah juga melaksanakan program peningkatan kapasitas aparatur, seperti pelatihan teknis, bimbingan teknis penggunaan aplikasi, serta penguatan budaya kerja berbasis digital (Reformasi & Dewi, 2024). Program-program tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa perubahan kultur kerja merupakan bagian integral dari reformasi digital. Transformasi digital tidak akan berjalan efektif tanpa perubahan pola pikir, etos kerja, dan kemampuan adaptasi aparatur.

Di sisi lain, pemerintah juga meningkatkan edukasi digital kepada masyarakat melalui sosialisasi penggunaan aplikasi layanan, penyediaan pusat bantuan layanan digital, dan pengembangan kanal komunikasi yang lebih mudah diakses (Muchlashin, 2025). Pendekatan ini penting agar digitalisasi tidak hanya menjadi reformasi internal birokrasi, tetapi juga reformasi partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna utama layanan publik.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa reformasi pelayanan publik digital di Kota Bukittinggi masih berada dalam fase transisi menuju kematangan digital governance. Komitmen pemerintah sudah kuat, standar normatif telah dirumuskan, dan berbagai program perbaikan sudah mulai berjalan. Namun, tantangan struktural seperti kapasitas SDM, kesiapan teknologi, dan literasi digital

masyarakat masih perlu diatasi secara sistematis dan berkelanjutan. Implementasi digitalisasi memerlukan pendekatan holistik yang mencakup penguatan regulasi, pengembangan infrastruktur, peningkatan kompetensi aparatur, pemberdayaan masyarakat, dan evaluasi kinerja yang konsisten.

Dengan memperkuat seluruh aspek tersebut, pemerintah Kota Bukittinggi berpotensi memperkecil kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*, sehingga digitalisasi benar-benar dapat mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan inklusif. Reformasi digital bukan sekadar inovasi teknis, tetapi transformasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan dalam upaya menciptakan pelayanan yang lebih adaptif terhadap tuntutan era digital.

KESIMPULAN

Reformasi pelayanan publik digital di Kota Bukittinggi menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk membangun tata kelola yang lebih modern, efisien, dan transparan. Langkah ini mencerminkan *Das Sollen*, yaitu standar ideal yang menempatkan digitalisasi sebagai instrumen peningkatan mutu layanan dan percepatan proses birokrasi. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi kendala signifikan. Kesiapan SDM yang belum merata, keterbatasan infrastruktur digital, serta variasi literasi teknologi masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan *Das Sein* belum sepenuhnya sejalan dengan idealitas tersebut. Dengan demikian, diperlukan upaya sistematis untuk memperkecil kesenjangan antara apa

yang seharusnya dicapai dan apa yang terjadi dalam praktik.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah perlu memperkuat kompetensi aparatur melalui pelatihan intensif dan berkelanjutan, khususnya terkait penguasaan aplikasi pelayanan publik digital. Integrasi sistem antar-perangkat daerah juga perlu dipercepat agar tercipta layanan yang terhubung dan konsisten. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi literasi digital harus menjadi prioritas untuk memastikan inklusivitas akses layanan. Evaluasi kebijakan berbasis data serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan mitra strategis akan meningkatkan efektivitas reformasi. Pendekatan ini diharapkan mampu mempersempit jurang *Das Sollen-Das Sein* dan mendorong terwujudnya pelayanan publik digital yang lebih responsif, akuntabel, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almasari Aksenta, Irmawati, Ridwan, A., Hayati, N., Sepriano, Herlinah, Silalah, A. T., Pipin, S. J., Abdurrohim, I., Boari, Y., Mardiana, S., Sutoyo, M. N., Sumardi, & Ginting, I. P. G. T. W. (2023). *LITERASI DIGITAL: Pengetahuan & Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 dan Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Darmawan, A. (2019). Meningkatkan Peran Inkubator Bisnis Sebagai Katalis Penciptaan Wirausaha Di Asia Pasifik: Tinjauan Ekonomi Makro. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.33019/equity.v7i1.1000>
- i1.24
- Dolosi, D., Dengo, S., & Kolondam, H. (2018). Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Tobelos Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 1–8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/19027/18588>
- Eneng Indriyanih. (2022). *Analisis Kepuasan Pengguna Aplikasi Tangerang Live Menggunakan Metode End User Computing Satisfaction (Eucs)*. 1–187.
- Kelibay, I., Boinauw, I., Rosnani, R., & Kalagison, M. D. (2022). Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 167–181. <https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1739>
- Kiswantono, A., Fakhrudin Syah, A. R., & A. M. A. M. (2024). Realizing Energy Independence: Automation Solutions with Visual Studio for PLN and PLTS Integration via ATS Panel. *JTECS : Jurnal Sistem Telekomunikasi Elektronika Sistem Kontrol Power Sistem dan Komputer*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.32503/jtecs.v4i1.4750>
- Muchlashin, A. (2025). Pemberdayaan Ekonomi Melalui Aplikasi Si Polgan dalam Mewujudkan Smart Village di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. *Journal Of Community Development and Disaster*

Management, 7(1), 245–257.
<https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.6887>

Nurlaila, Zuriatin, & Nurhasanah
Nurhasanah. (2024).
Transformasi Digital Pelayanan
Publik: Tantangan dan Prospek
dalam Implementasi E-
Government di Kabupaten Bima.
*Public Service and Governance
Journal*, 5(2), 21–37.
<https://doi.org/10.56444/psgj.v5i2.1468>

Reformasi, T. P. W., & Dewi, A.
(2024). Ketimpangan Das Sollen
Dan Das Sein: Pemberian
Hukuman Mati. *Jurnal hukum
indonesia*, 3(4), 168–176.
<https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.142>

Wulandari, S. (2023). Penguanan
Reformasi Birokrasi di Indonesia.
Jurnal Public Relation, 4, 51–61.